

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Ali, A. (2002). *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Toko Gunung Agung.
- Dewi, D. I. (2018). *Buku Ajar Kebijakan Pertanahan Di Indonesia*. Semarang: Undip Press Semarang.
- Hanitijo, R. S. (1990). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Hanitijo, R. S. (1990). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Harsono, B. (2005). *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- Harsono, S. (1992). *Kegunaan Sertifikat dan Permasalahannya*. Yogyakarta: Seminar Nasional.
- Hutagalung, A. S. (2012). *Hukum Pertanahan di Belanda dan Indonesia*. Denpasar: Pustaka Larasan.
- Marzuki, P. M. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Murad, R. (1991). *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*. Bandung: Mandar Maju.
- Parlindungan, A. (1994). *Pendaftaran Tanah di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

Perangin, E. (1996). *Praktek Pengurusan Sertipikat Hak Atas Tanah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Prajoto, E. (2006). *Antinomi Norma Hukum Pembatalan Pemberian Hak Atas Tanah Oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Dan Badan Pertanahan Nasional*. Bandung: CV. Utomo.

Laporan Kerja Tahunan 2016 Kementrian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional RI Kantor Pertanahan . Kota Tangerang Selatan: Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan.

Siregar, T. A. (2007). *Pendaftaran Tanah Kepastian Hak*. Medan: Multi Grafik.

Soerodjo, I. (2003). *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia*. Surabaya: Arkola.

Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sutedi, A. (2007). *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*. Jakarta: Sinar Grafika.

Syahrani, R. (1999). *Rangkuman Inti Sari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Syarief, E. (2012). *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

2. Jurnal

Altyara, R. (2019). *Akibat Hukum Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Yang Digunakan Sebagai Jaminan Menurut UU Nomer 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah*. Jember: Universitas Jember.

- Hairan. (2012). *Pendaftaran Tanah Dalam Sertipikasi Hak Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah*. Fakultas Hukum (p. 2). Kalimantan Timur: Universitas Mulawarman.
- Mimi. (2016). *Tugas Dan Fungsi Kantor Pertanahan Dalam Penyelesaian Sertipikat Hak Milik Ganda (Overlapping) Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum Di Kabupaten Sleman*. Kabupaten Sleman: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Muin, T. N. (n.d.). *Penyelesaian Sengketa Sertifikat Ganda Hak Atas Tanah (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara Makassar)*. hal 134.
- Octavianus, J. (2010). *Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 556/K/PDT/1987*. Depok: Universitas Indonesia.
- Parsaulian, S. A. (2019). *Masalah Tumpang Tindih Sertifikat Hak atas Tanah di Kota Banjarbaru (Putusan Nomor 24/G/2014/PTUN.BJM)*. Jurnal Agraria dan Pertanahan Volume 5 No. 1 Mei .
- Permadi, I. (2016). *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Tanah Bersertifikat Ganda Dengan Cara Beritikad Baik Demi Kepastian Hukum*. Jurnal Yustisia Vol. 5 No. 2 Mei - Agustus.
- Rato, D. (2010). *Filsafat Hukum Mencari, Memahami, dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Rosyida, U. (2019). *Peran Kantor Pertanahan Yogyakarta Dalam Penyelesaian Kasus Sengketa Tanah Dengan Mediasi Di Kota Yogyakarta Tahun 2018-2019 Guna Mewujudkan Keadilan Dan Kepastian Hukum*. Yogyakarta.

- Rumidi, S. (2002). *Metode Penelitian*. Gadjah Mada University Press, Hal. 65.
- Sahono, L. M. (2012). *Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Dan Implikasi Hukumnya*. Jurnal Edisi No. 2 Vol. 17, Hal. 93.
- Sorongon, R. J. (2015). *Dampak Yuridis Terhadap Penerbitan Sertifikat Ganda Oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN)*. Vol. 3 No. 3, Hal. 125.
- Widyani, I. D. (2015). *Kepastian Hukum Sistem Publikasi Dalam Pendaftaran Tanah Di Indonesia Menurut UU RI Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok - Pokok Agraria*. Vol. 1 No. 3, Hal. 205.
- Widyanto, L.O (2018). *Prinsip Kepastian Hukum Terhadap Sertipikat Ganda Hak Atas Tanah Sebagai Hak Milik*. Skripsi. Jember. 2018. Hal. 2

3. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 *Tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria*
- Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 *Tentang Badan Pertanahan Nasional*
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 *Tentang Pendaftaran Tanah*
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 *Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan*

4. Internet

- | | | | |
|---|------|----------------------|------------|
| Analisis | Data | Penelitian | Kualitatif |
| https://youdant.wordpress.com/2011/06/13/98/ | | Diakses pada tanggal | |
| 05 Oktober 2020 | | | |

Metodologi Penelitian. <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pendidikan/dra-wening-sahayu-mpd/metodologi-penelitian.pdf>. diakses pada tanggal 27 Februari 2021

